



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
NATIONAL COUNCIL PARLEMEN AFRIKA SELATAN  
BERSAMA KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan ke-	: V (Lima)
Hari/Tanggal Pertemuan	: Senin, 10 Juli 2017
Jam Pertemuan	: 13.00 – 15.15 WIB
Tempat Pertemuan	: Ruang Tamu Pimpinan DPR RI Gedung Nusantara III Lantai II
Pimpinan Pertemuan	: Abdul Fikri Faqih/ Wakil Ketua Komisi X
Hadir Komisi X DPR RI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anita Yacoba Gah, SE. - Fraksi Partai Demokrat</li><li>2. Dra. Hj. Lathifah Shohib – Fraksi PKB</li><li>3. Yayuk Basuki – Fraksi PAN</li><li>4. Kresna Dewanata Phrosakh, SH Fraksi Nasdem.</li><li>5. Sri Melyana – Fraksi Gerindra</li><li>6. Michael Wattimena, SE.,MM.(F.PD)</li></ol>
Hadir Delegasi Parlemen Afrika Selatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Honorable Committee Chairperson on Education and Recreation, African National Congress, Ms. L.L. Zwane</li><li>2. Honorable Committee Chairperson on Social Service, African National Congress, Ms. L.C. Dlamini</li><li>3. Honorable African National Congress Whip, Ms. T.K. Mampuru</li><li>4. Honorable African National Congress, Ms. P.C. Samka and Ms. L. Moshadi</li><li>5. Honorable, Mr. M. Khawula, Inkatha Freedom Party, African National Congress</li><li>6. Honorable, Mr. C. Hattingh and Ms. T. Mpambo-Sibhukwana, DA, African National Congress</li><li>7. Honorable, Ms. D.B. Ngwenya, EFF, African National Congress</li><li>8. Secretary of the Committee, Ms. N. Skaka and Ms. MA William</li><li>9. Committee Content Advisor, Mr. L. Komle and Ms. T.J. Ketyle</li></ol>
Hadir Mitra Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Artanto S. Wangadinata (Diplomat Madya, Kementerian Luar Negeri)</li><li>2. Irwan Iding (Kasubdit Kementerian Luar Negeri)</li></ol>

## I. Pendahuluan

Pertemuan dibuka dengan sambutan dari Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua Komisi X) yang memperkenalkan seluruh anggota DPR RI dari Komisi X serta pendamping dari Kementerian Luar Negeri RI yang hadir dalam pertemuan tersebut.

## II. Kesimpulan

1. Komisi X DPR RI dan *National Council* Parlemen Afrika Selatan masing – masing menyampaikan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan. Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa:
  - a. Sistem pendidikan di Indonesia tercermin pada Pembukaan dan Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-undang lain yang terkait, seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan undang-undang lainnya.
  - b. Program pendidikan di Indonesia yang sedang dilaksanakan antara lain program sekolah garis depan, guru garis depan, *world class university*, peningkatan akses dan mutu, serta lainnya.
  - c. Amanat legislasi menyatakan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, yang peruntukannya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - d. Terkait pariwisata, Indonesia memiliki UU tentang Kepariwisata yang mengatur tentang Ekosistem Pariwisata Indonesia. Devisa Pariwisata Indonesia menempati posisi ketiga setelah ekspor dan perdagangan jasa dengan nilai devisa sebesar Rp172 triliun (ZAR 0,169 triliun) pada tahun 2016. Dan untuk menaikkan kunjungan wisata, Indonesia membebaskan visa kedatangan untuk 169 negara serta menetapkan 10 destinasi wisata prioritas.
2. *National Council* Parlemen Afrika Selatan menyampaikan bahwa:
  - a. Komite Pendidikan dan Rekreasi Parlemen Afrika Selatan membidangi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Seni dan Budaya, Olahraga, dan Rekreasi. Anggota Komite Pendidikan dan Rekreasi terdiri dari 12 anggota.
  - b. Tujuan pertemuan ini adalah mendengarkan paparan Komisi X DPR RI dan mempelajari praktek pendidikan di Indonesia untuk membuat kebijakan-kebijakan terbaik di Afrika Selatan. Saat ini Parlemen Afrika Selatan sedang merombak beberapa peraturan terkait bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial, sehingga membutuhkan banyak informasi. Hal ini dilakukan karena baru 23 tahun Afrika Selatan melepaskan diri dari sistem Politik Apartheid.
  - c. Anggaran pendidikan yang berasal dari APBN adalah 40%, dan diarahkan untuk pendidikan kaum miskin. Pendidikan Dasar dan Tinggi tinggi mengambil porsi besar dalam anggaran. Pemerintah menjalankan program Beasiswa sekitar 9 Miliar untuk memastikan anak tidak mampu, dapat mengakses pendidikan tinggi. Anggaran juga dialokasikan untuk buku teks gratis, peralatan sekolah gratis, merenovasi gedung sekolah yang dari tanah liat ke semen, makanan tambahan untuk anak sekolah, termasuk untuk transportasi siswa, meskipun tidak semua dapat diberikan.

- d. Pendidikan dijamin oleh konstitusi, dan saat ini Afrika Selatan memiliki sekitar 25 ribu sekolah, 26 Perguruan Tinggi, 23 Sitas (Balai Latihan Kerja), 50 Politeknik.
- e. Sistem pendidikan di Afrika Selatan terdapat tiga jalur untuk pendidikan dasar yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, jalur pendidikan teknis, jalur pendidikan kejuruan, dan jalur pendidikan akademis.
- f. *National Council* Parlemen Afrika Selatan diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja Pemerintah, memastikan anggaran berjalan sebagaimana yang telah disetujui. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas negara dan agar masyarakat memiliki kertampilan. Parlemen juga membuat UU dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan.
- g. *National Council* Parlemen Afrika Selatan menyampaikan beberapa pertanyaan terlampir, sebagai bahan untuk melakukan melakukan perbaikan sistem pendidikan di Afrika Selatan. Pertanyaan akan disampaikan ke Kemendikbud RI untuk mendapatkan jawaban langsung pada kunjungan Parlemen Afrika Selatan di Kemendikbud RI.

### III. Penutup

Pertemuan ditutup pada pukul 15.15 WIB

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat



Drs. Robert Juheng Purba  
NIP. 19620703 199203 1 002

## Lampiran

Pertanyaan yang disampaikan oleh *National Council* Parlemen Afrika Selatan:

1. Apakah Anggota delegasi *National Council* Parlemen Afrika Selatan dapat mengunjungi sekolah terbaik dan terburuk di Jakarta?
2. Bagaimana pengembangan dan pengelolaan program pendidikan yang berbasis kejuruan (sistem pendidikan vokasi)? Kemana para siswa kejuruan diarahkan pasca menyelesaikan pendidikan kejuruan?
3. Bagaimana sistem pendidikan untuk guru di Indonesia, apakah guru bisa langsung mengajar, atau ada pendidikan khusus sebelum mengajar?
4. Bagaimana dengan pengadaan guru (sdm pendidikan), pelaksanaan program pengadaan guru, apakah para guru juga membentuk organisasi profesi (serikat pekerja guru), dan masalah yang dihadapi terkait guru serta penyelesaiannya seperti apa.
5. Adakah program untuk transportasi bagi anak sekolah dan makanan tambahan untuk anak sekolah? Bagaimana pengelolaan anggaran bagi siswa miskin?
6. Bagaimana membangun sistem yang memperbaiki disiplin para siswa, dan pembangunan karakter? Bagaimana menangani masalah narkoba dan kehamilan anak sekolah, apakah dikerjasamakan dengan polisi (atau pihak lain), permasalahannya seperti apa dan cara mengatasinya bagaimana?
7. Penyandang anak sekolah penyandang disabilitas, kemana mereka diarahkan, apakah dikerjasamakan dengan swasta atau diarahkan untuk langsung bekerja? Bagaimana dengan gedung-gedung publik yang mengatur tentang bangunan ramah penyandang disabilitas.
8. Bagaimana terkait pengendalian virus HIV/AIDS yang dihadapi oleh para pelajar, termasuk di masyarakat?